



Analisis Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Riau; Pendekatan Regresi Data Panel

Analysis of Economic Growth Between Regions in Riau Province; Panel Data Regression Approach

Muhammad Hidayat^{*)}, Ranti Darwin, M. Fikry Hadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

^{*)} email: m.hidayat@umri.ac.id

Article Info

Article history:

Received: April 2018

Accepted: Mei 2018

Published: Juni 2018

Keywords:

Economic growth,
government expenditure,
investment, labor,
inequality

JELClassification:

Abstract

This study aims to examine the effect of decentralization, expenditure, investment, labor and inequality on economic growth between regions in Riau Province. The type of this research is quantitative descriptive research using secondary data type. Data analysis technique used in this research is using Data Panel Regression by using application program Eviews 9.0. The results of this study indicate that the variable of tax decentralization does not have a significant and positive influence on economic growth among regions in Riau Province. Government expenditure, investment, and labor have a significant influence on economic growth among regions in Riau Province. In addition, inequality has a positive and non-significant impact on the economic growth between regions in Riau Province.

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai pusat perdagangan Indonesia bagian barat dan wilayah yang termasuk dalam koridor utama pada Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) wilayah Sumatera. Dalam proses pengembangan wilayah perlu diidentifikasi mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut maka setidaknya masalah yang ada dapat diantisipasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

Perekonomian Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dengan penggunaan data PDRB termasuk migas, sejak tahun 2011 tumbuh positif dengan tingkatan yang berfluktuatif, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 5,57 persen dan tahun 2015 sebesar 0,22 persen dan rata-rata pertumbuhan 2,95 persen. Selanjutnya, dengan penggunaan data tanpa migas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di tahun 2011 sebesar 7,76 persen dan terus berfluktuatif hingga tahun 2015 menjadi sebesar 2,01 persen dengan rata-rata pertumbuhan 4,90 persen.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan disertai dengan perubahan pada distribusi output dan struktur ekonomi (Nafziger, 2012). Idealnya, pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu indikator kinerja pembangunan yang memiliki fungsi dan analisa terhadap pembangunan di suatu wilayah. Untuk peningkatan perekonomian, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta investasi mempunyai cakupan yang penting sebagai penyokong pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga untuk mengkaji faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.

TINJAUAN LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Mankiw, 2012; Nafziger, 2012).

Mengikuti logika Keynes, model pertumbuhan ekonomi interregional sederhana dapat dirumuskan dalam beberapa persamaan sebagai berikut ini : (Sjafrizal, 2012)

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M) \quad (2.1)$$

Dimana Y , C , I , G , X , dan M masing-masingnya adalah pendapatan regional (PDRB), konsumsi, investasi, ekspor dan impor, sedangkan subskrip ini menunjukkan *region* (daerah).

Interregional Income Model dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Dalam Model Interregional, export diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem (*endogeneous variable*) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Disamping itu, agar analisa menjadi lebih realistis, maka pada model antar *region* ini dimasukkan pula unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip *Teori Ekonomi Keynes*.

Begitu juga dengan Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori Neo-klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber

pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Charles, 2014).

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi; 2) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi; 3) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi. Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan dengan:

$$Y = T K_t^\alpha L_t^{\alpha-1} \quad (2.2)$$

Dimana Y adalah output; K adalah Modal; L adalah angkatan kerja yang bekerja; dan T adalah teknologi.

Previos Study

Hubungan Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja Dan Ketimpangan Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang menggambarkan hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Rustan (2013) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat *decentralization theorem* dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusuma (2016) dan Kusuma & Badrudin (2016) bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator desentralisasi kemampuan pendapatan asli daerah dalam pembentukan total pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Lamartina & Zaghini (2011) dan Wang et al. (2016) membuktikan keterkaitan teori Wagner yang menyatakan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan PDB, karena penggunaan koefisien elastisitas belanja publik relatif terhadap PDB, selanjutnya Arpaia & Turrini (2008) menerapkan tes kointegrasi yang menunjukkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi dan belanja publik dihubungkan oleh hubungan jangka panjang yang stabil. Penelitian Boldeanu & Ianu (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah diberbagai sektor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kartikasari (2017) dan penelitian Astuti et al. (2017) dalam penelitian yang dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Riau Indonesia dan Kabupaten Pelalawan menemukan bahwa secara parsial ekspor memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara impor memiliki negatif yang signifikan dampak dan begitu juga dengan dengan pertumbuhan penduduk dan investasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Benjamin et al. (2017); Dewi & Ida (2014); Bakri et al. (2016); Darwin, Hidayat & Hadi (2017) temuan mengindikasikan bahwa hubungan jangka panjang antara ketimpangan dan pertumbuhan adalah positif secara alamiah yang terbuktinya hipotesa kuznet dan didorong terutama oleh konsentrasi di masing-masing level pendapatan. Selain itu investasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.

Penelitian Sudarlan (2015) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sangat signifikan, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan

ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sumber ketimpangan dan IPM dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian akan dilakukan di Provinsi Riau. Daerah yang menjadi unit analisis adalah 12 daerah yang ada di wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Dumai serta 10 kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berupa data *time series* yaitu data Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Investasi (PMA & PMDN), Tenaga Kerja, Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2016.

Teknik Analisis Data

Dalam menguji dan mengolah data yang akan dianalisis maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa pengujian data. Adapun pengujian data yang dilakukan yaitu menggunakan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) yang dilanjutkan dengan *Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data - Hausman Test* dan uji hipotesis (Gujarati, 2012). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software EVIEWS 9.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil Olahan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.576483	1.804756	1.427608	0.1581
Desentralisasi Fiskal?	0.003845	0.031983	0.120208	0.9047
Pengeluaran Pemerintah?	0.164520	0.059501	2.764975	0.0074
Investasi?	-1.63E-07	5.48E-08	-2.981403	0.0040
Tenaga Kerja?	6.35E-06	2.91E-06	2.182095	0.0327
Ketimpangan Pembangunan?	-0.843497	1.477778	-0.570787	0.5701

Berdasarkan hasil olahan data di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob t-statistik pada variabel desentralisasi fiskal sebesar 0,9047, dimana nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 5 persen atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Nilai Prob t-statistik variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,0074 dimana nilainya lebih kecil dari tingkat alfa 5 persen atau 0,05 yang artinya variabel pengeluaran pemerintah secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki nilai Probabilitas Statistik sebesar 0,0040 dimana nilai ini tentunya lebih kecil dari alfa 5 persen yang menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Begitu juga dengan Tenaga kerja yang memiliki nilai Prob t-statistik sebesar 0,0327 yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa 5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Ketimpangan pembangunan memiliki nilai Prob t-statistik 0,5701 yang nilainya lebih besar dari alfa 5

persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.

Hubungan Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja dan Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah Provinsi Riau. Nilai Probabilitas dari variabel ini lebih tinggi dari alfa 5 persen atau 0,05 dengan nilai 0,9047. Koefisien variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai koefisien sebesar 0,0038 sehingga dapat diartikan jika desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0038 persen dengan asumsi *Ceteris Paribus*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sektor fiskal daerah tersebut dalam sistem kesatuan negara Indonesia. Desentralisasi memiliki komponen utama yang disebut desentralisasi fiskal yang memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan pengeluaran sektor publik dan pengelolaan penerimaan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian ini variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih belum meratanya penyediaan sektor publik dan pendapatan per kapita untuk setiap kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustan (2013) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau dengan nilai probabilitas 0,0074 yang lebih kecil dari taraf nyata 5 persen atau 0,05. Nilai koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah yaitu 0,1645 yang artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,1645 dengan asumsi *Ceteris Paribus*. Pengeluaran pemerintah mengindikasikan kebijakan pemerintah dalam penentuan anggarannya dan pengeluaran pemerintah akan selalu mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian, seperti adanya perubahan kegiatan sektor swasta, perubahan demografi maupun perubahan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamartina & Zaghini (2011) dan Wang et al. (2016) yang membuktikan keterkaitan teori Wagner yang menyatakan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan PDB, karena penggunaan koefisien elastisitas belanja publik relatif terhadap PDB, selanjutnya penelitian (Boldeanu & Ianu, 2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah diberbagai sektor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah maka akan memiliki hubungan timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di provinsi Riau.

Investasi memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel investasi memiliki nilai Probabilitas t-statistik sebesar 0,0040 yang lebih kecil dari alfa 5 persen atau 0,05. Nilai koefisien dari investasi yaitu sebesar -1,63 yang artinya jika investasi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,0040 dengan asumsi *Ceteris Paribus*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa investasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya investasi di suatu wilayah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di suatu wilayah juga akan ikut menurun

dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi investasi yang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja memiliki nilai Probabilitas t-statistik sebesar 0,0327 berada dibawah alfa 5 persen atau 0,05. Tenaga kerja memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien tenaga kerja adalah sebesar 6,35 yang artinya jika tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 1 persem maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 6,35 dengan asumsi *Ceteris Paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang produktif dan berpendidikan dapat mendorong pendapatan per kapita masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.

Studi mengenai investasi dan tenaga kerja juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari (2017) dan Astuti, Ayu Windi; Hidayat, Muhammad; Darwin, (2017) dimana dalam penelitian yang dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Riau Indonesia dan Kabupaten Pelalawan dinyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara impor memiliki negatif yang signifikan dampak dan begitu juga dengan dengan pertumbuhan penduduk dan investasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel tenaga kerja tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana hasil penelitian terdahulu menunjukkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan pembangunan memiliki nilai koefisien sebesar -0,8434, yang artinya jika ketimpangan pembangunan mengalami kenaikan sebesar 1 persem maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,8434 dengan asumsi *Ceteris Paribus*. Nilai Probabilitas t-statistik pada variabel ketimpangan pembangunan sebesar 0,5701 yang lebih rendah dari alfa 5 persen atau 0,05. Ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di kabupaten Kota Provinsi Riau tidak memberikan pengaruh yang berarti pada pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kota Provinsi Riau, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut. Perekonomian yang berkemajuan akan tercermin dari rendahnya tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarlan (2015) dan Hidayat (2014) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sangat signifikan, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. hasil kedua menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sumber ketimpangan dan IPM dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Disamping itu pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun variabel investasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja juga memperlihatkan adanya hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain, ketimpangan pembangunan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.

SARAN

Berdasarkan pembahasan desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi, tenaga kerja dan ketimpangan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka disarankan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk dapat menitikbertakan perhatian pada upaya mendorong perkembangan desentralisasi fiskal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu diharapkan pemerintah Provinsi Riau juga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah serta meningkatkan pertumbuhan investasi dan mengembangkan iklim investasi di Provinsi Riau. Selain itu pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk meminimalisir tingkat ketimpangan pembangunan yang muncul di Kabupaten/Kota yang ada sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta berbagai pihak yang turut memberikan dukungan kepada tim peneliti dalam menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A., R. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3), 284–304.
<https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124>
- Arpaia, A., & Turrini, A. (2008). Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment. *European Economy Economic Papers*, (No. 300), 1–50.
- Astuti, W. A., Hidayat, M., Darwin, R., Ekonomi, F., & Riau, U. M. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 141–147.
- Bakri, B., Syafrizal, S., & Aimon, H. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4(7).
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329>
- Benjamin, D., Brandt, L., & McCaig, B. (2017). Growth with equity: income inequality in Vietnam, 2002–14. *The Journal of Economic Inequality*.
<https://doi.org/10.1007/s10888-016-9341-7>
- Boldeanu, F. T., & Ianu, I. Ț. (2016). Does government spending boost economic growth in Europe? *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*, 9(1), 213–228.
- Charles, I. J. (2014). *Macroeconomics*. (J. Repcheck, Ed.) (3rd ed.). New York: W. W. Norton & Company.
- Darwin, R., Hidayat, M., & Hadi, M. F. (2017). Pro-Poor and Pro-Growth Developmental Policy Analysis in Riau Province. In *Garuda Plaza Hotel Medan*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Dewi, U., & Ida, A. I. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(2). Retrieved from <http://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/7494/5894>
- Frank, M. W. (2009). Inequality and Growth In The United States: Evidence From A New

- State-Level Panel Of Income Inequality Measures. *Economic Inquiry*, 47(1), 55–68.
<https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2008.00122.x>
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics*. New York.
<https://doi.org/10.1126/science.1186874>
- Halter, D., Oechslin, M., & Zweimüller, J. (2014). Inequality and growth: the neglected time dimension. *Journal of Economic Growth*, 19(1), 81–104.
<https://doi.org/10.1007/s10887-013-9099-8>
- Hidayat, M. (2014). Inequality across districts and cities in the Riau. *Economic Journal of Emerging Markets*, 6(2), 106–118. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol6.iss2.art4>
- Kartikasari, D. (2017). The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Islands Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 663–667. Retrieved from
<https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/5217/pdf>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–92.
- Kusuma, M. W., & Badrudin, R. (2016). Fiscal decentralization effect on economic growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(October), 136–147.
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol8.iss2.art6>
- Lamartina, S., & Zaghini, A. (2011). Increasing Public Expenditure: Wagner's Law in OECD Countries. *German Economic Review*, 12(2), 149–164.
- Mankiw, G. N. (2012). *Macroeconomics* (8th ed.). New York: Worth Publishers.
- Nafziger, E. W. (2012). *Economic Development*. *Economic Development* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139028295>
- Sari, N. R., & Pujiyono, A. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 0(0), 134–148. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/3184>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarlan. (2015). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Eksis*, 11(1), 3036–3213.
- Wang, L., Xu, H., & Dumitrescu Peculea, A. (2016). The relationship between public expenditure and economic growth in Romania: Does it obey Wagner's or Keynes's Law? *Theoretical and Applied Economics*, XXIII(3608), 41–52.